



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

4.1. Visi Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Kabupaten Bintan yang lebih sejahtera adalah cita-cita dan harapan bersama dengan tekad melakukan sejumlah perubahan-perubahan mendasar untuk mempersiapkan pondasi yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Bintan pada periode 2016-2021, guna menyongsong terwujudnya Kabupaten Bintan Gemilang pada 2025.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 adalah :

**Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera
Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di
Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”**

Adapun penjelasan visi tersebut berdasarkan kata kunci adalah sebagai berikut :

Madani :

1. Masyarakat yang beradab dan agamis
2. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
3. masyarakat yang demokratis
4. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Program-program pembangunan berbasis masyarakat

Madani merupakan perwujudan dari masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah

masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, *taken for granted*. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus.

Sejahtera :

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Daya beli

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Bintan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi daerah lainnya.

Bintan Gemilang 2025 Gerakan Melangkah Maju di Bidang:

1. Kelautan
2. Pariwisata
3. Kebudayaan

Memiliki arti “Gerakan Melangkah Maju”, gerakan yang dimaksud merupakan gerakan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk lebih maju yang melibatkan secara aktif seluruh pihak di kabupaten Bintan dengan jangka waktu target capaian sampai tahun 2025. Pembangunan dikembangkan sesuai potensi dan keunggulan kabupaten Bintan, yaitu sektor kelautan dan pariwisata sebagai **core** dan sekaligus sebagai **driver activity**. Serta dengan melestarikan dan memajukan seluruh hasil kegiatan dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian, dan adat istiadat dengan bersandar pada Budaya Melayu.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditentukan 8 (delapan) Misi pembangunan 2016-2021 yang akan dicapai yaitu:



1. Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan.
2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata.
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global.
5. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat.
6. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
7. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan
8. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4.1.1. Keterkaitan Antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Bintan 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Nasional 2015-2019

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah: **"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**, yang diwujudkan melalui pelaksanaan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi,



dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam tiga dimensi pembangunan yaitu:

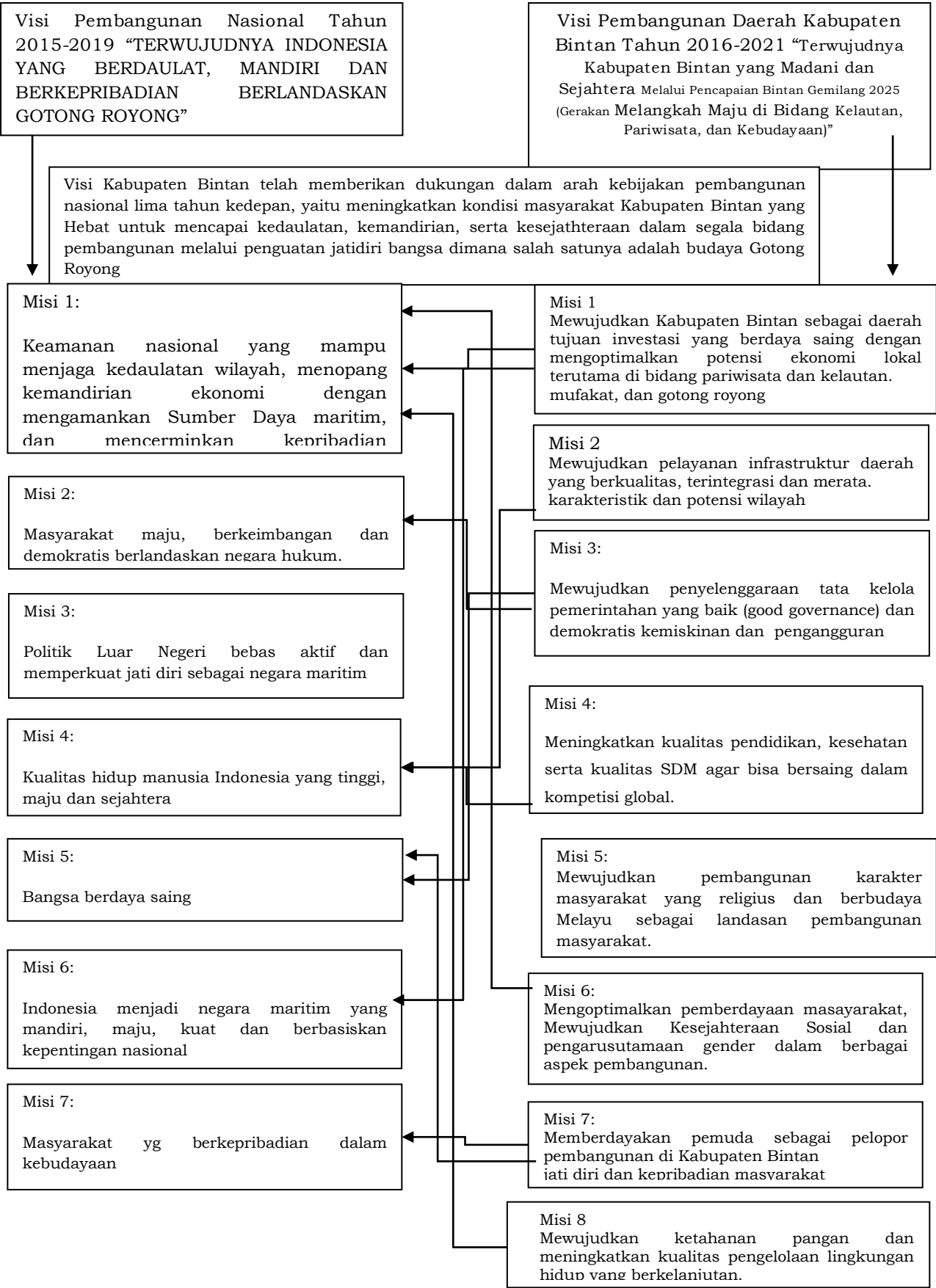
1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Adapun keterkaitan antara arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1. Keterkaitan antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Nasional 2015-2019





4.1.2. Keterkaitan Antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Bintan 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2016 - 2021

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah: ***”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”***.

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

b. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

c. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

d. Ramah Lingkungan

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

e. Unggul di Bidang Maritim

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata



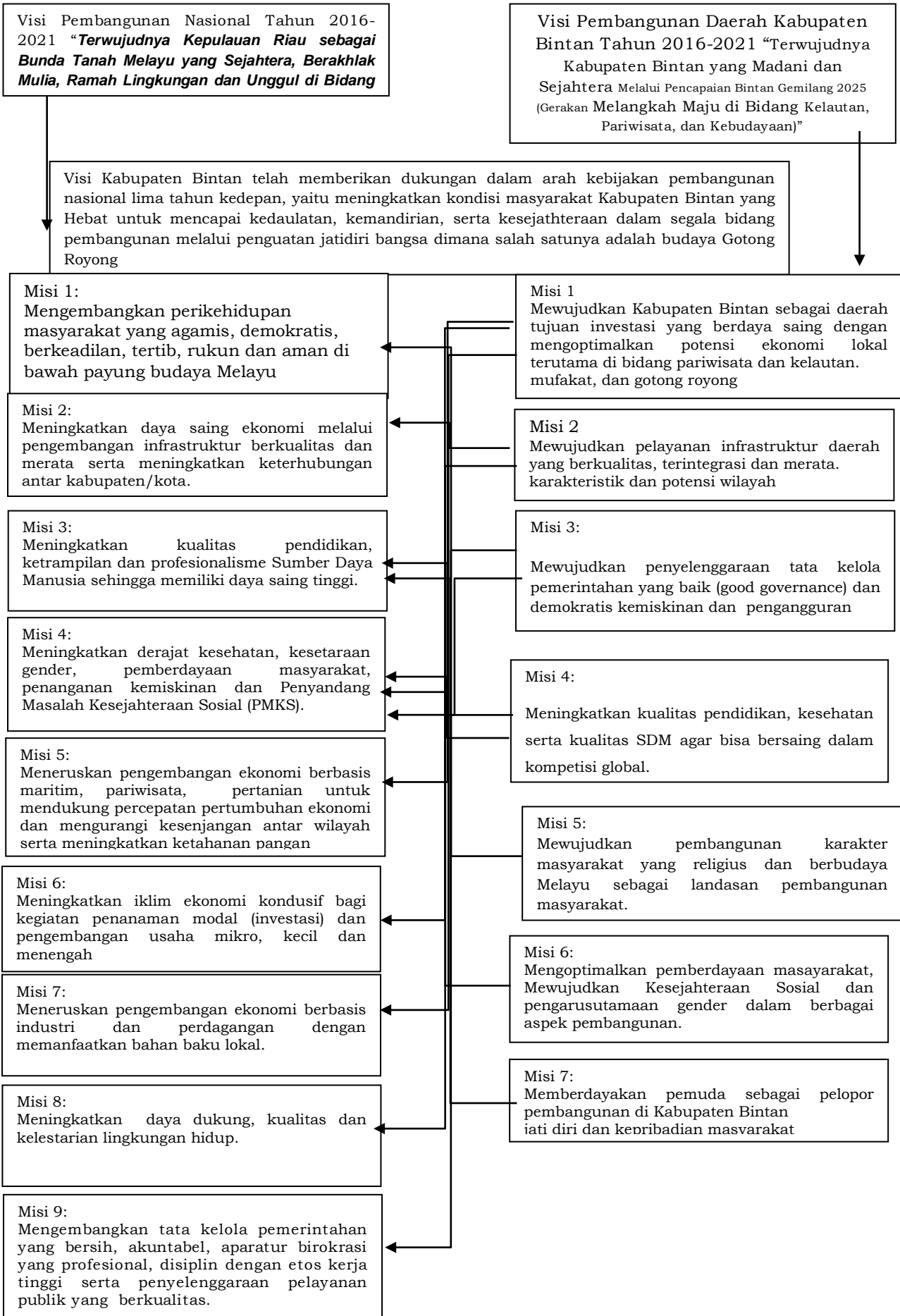
didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (*maritim oriented*). Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari.

Dalam rangka mewujudkan visi **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**, misi yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.

- a. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
- b. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
- d. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- e. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
- f. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
- h. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
- i. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.



Gambar 4.2. Keterkaitan antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2016 - 2021





4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bintan

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Berikut ini tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2019.

Misi 1 Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
Terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan yang sesuai dengan tata ruang	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	≥5	Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	juta USD	1.661
						Pertumbuha n Ekonomi	%	≥5
					Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda penataan Ruang	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75
Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisataw a n	493.495	850.000	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	800.000
	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	7,8	≥7,0	Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD	Kontribusi BUMD terhadap PAD	Milyar Rupiah	2.88
					Meningkatnya nilai produksi perikanan	Persentase pertumbuha n sub sektor perikanan dalam PDRB	%	≥7,0
					Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Persentase pertumbuha n sektor industri dalam PDRB	%	≥6,0
						Tingkat Inflasi	%	(4±1)%



Misi 2: Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang tertata	%	3,3	28	Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan prasarana transportasi serta kapasitas dan fungsi sanitasi, air bersih/minum	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	53,028
						Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	42,19
					Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan	Persentase kawasan permukiman yang tertata	%	27
Meningkatkan sarana prasarana pengairan untuk mengurangi resiko bencana	Rata-rata lama genangan	menit	n/a	85	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan	Rata-rata lama genangan	menit	120
Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	8	11	Terhubungnya Aktivitas antar pulau	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	11

Misi 3: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis					Meningkatnya profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	44



Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	11,98	13,20	Meningkatnya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu	APK PAUD 3-6 Tahun	%	61,1
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,28	9	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket A dan SMP/MTS/Paket B)	APM SD/MI/SLB/Paket A	%	97
						APM SMP/MTs/Paket B	%	78,95
						Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	13,01
						Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9
					Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	Persentase guru yang bersertifikat profesi	%	87,86
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,98	70	Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Presentase balita gizi buruk	%	0,33
						Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	12
						Angka Kematian ibu	Per 100.000 KH	< 231
						Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk	Jumlah Kecamatan	10
						Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	33
						Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (sucesss rate)	%	85



Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
						Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	Jumlah Desa/Kel	51
					Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan dan Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN	%	100
						Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Jumlah Puskesmas	15
						Status Akreditasi Rumah Sakit oleh komisi Akreditasi rumah sakit (KARS)	Status	TK.Madya
					Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,8
Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya .	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,74	5,39	Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,89
					Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	%	100



Misi 5 : Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	n/a	12	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	10
Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan	Jumlah Kasus Perselisihan antar umat beragama	konflik	0	0	Terwujudnya toleransi antar umat beragama	Jumlah Kasus Perselisihan antar umat beragama	konflik	0
					Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing- masing	Persentase siswa SMP beragama Islam memiliki sertifikat khatam Al Quran	%	82

Misi 6 : Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,92	≥70	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	≥70
	Persentase penduduk miskin	%	6,07	<6,5		Persentase penduduk miskin	%	<6,5
						Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	81
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat	poin	n/a	>50	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Masyarakat	poin	>50
					Meningkatnya pengelolaan pembangunan oleh pemerintah desa	Indeks Desa Membangun	poin	>50



Misi 7 : Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	10	80	Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	70
						Jumlah prestasi olah raga yang diraih tingkat provinsi dan nasional	Prestasi	50

Misi 8 : Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target2020
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	%	1,2%	1,3%	Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	%	1.3%
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh desa dan kelurahan	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat di seluruh wilayah	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Persentase RTH	%	n/a	100	Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Hasil pengukuran indeks kualitas air	poin	70
						Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	poin	1
					Terpenuhinya standar luas ruang terbuka hijau yang dikelola	Persentase RTH	%	100



4.3. Prioritas Pembangunan Daerah 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2019, antara lain antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
2. Laju inflasi sebesar 2,5 - 4,5%;
3. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5-9,5 %;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8 – 5,2%;
6. Gini rasio pada kisaran 0,38-0,39.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan

Money Follow Program. Rencana pembangunan nasional tahun 2019 dijabarkan dalam 5 prioritas nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energy, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

4.3.2. Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan tema pembangunan **“Pemerataan Pembangunan Kabupaten Bintan untuk Pertumbuhan Berkualitas”** dengan prioritas pada beberapa bidang pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Penjabaran lebih lanjut mengenai prioritas pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut :



No.	Prioritas Pembangunan Daerah Menurut RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah di RKPD 2019	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan	Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan	34.818.849.000
2	Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	185.341.013.000
3	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati	Meningkatkan kinerja perencanaan Pembangunan	125.869.760.400
4	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global	Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.	161.569.689.800
5	Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat	Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu	15.604.569.900
6	Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	16.347.913.800
7	Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan	Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	3.823.895.000



No.	Prioritas Pembangunan Daerah Menurut RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah di RKPD 2019	Alokasi Anggaran (Rp)
8	Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan	8.832.105.000

4.3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bintan pada perubahan RKPD Tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2019 Tri Wulan II maka prioritas pada perubahan RKPD 2019 adalah:

1. Melaksanakan pembangunan 2019 sesuai dengan prioritas RKPD 2019
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Mempercepat pencapaian target RJMD 2021
4. Meningkatkan infrastruktur daerah (terutama drainase)
5. Mengalokasikan dana kelurahan sebagaimana amanat yang telah ada dengan mendasarkan pada percepatan pencapaian RPJMD
6. Pencapaian target SDGs dan standar pelayanan minimal